

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat (Afriyani, 2018). Salah satu tujuan utama adanya otonomi daerah adalah terwujudnya *Good Government Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik (Wintari dan Suardana, 2018). Menurut Mardiasmo (2018:19) salah satu karakteristik *good governance* yang digunakan dalam akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* adalah adanya transparansi.

Asroel (2016), mengemukakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Hal ini untuk memenuhi hak dasar masyarakat (publik) terhadap pemerintah yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listen to*). Penerapan transparansi masih terbilang cukup rendah, hal ini dibuktikan dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Tahun 2017, Indonesia memperoleh skor 37 dalam *Corruption Perception Index (CPI)*, dan menempati peringkat 96 dari 180 negara yang diukur. Tahun 2018 Indonesia memperoleh skor 38 dalam *Corruption Perception Index (CPI)*, dan menempati peringkat 89 dari 180 negara yang diukur. Kemudian, pada tahun 2019 Indonesia memperoleh skor 40 dalam *Corruption Perception Index (CPI)*, dan menempati peringkat 85 dari 180 negara yang diukur. Skor CPI memiliki rentang nilai 0-100. Apabila suatu negara memperoleh skor CPI pada rentang yang kecil maka dipersepsikan negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

*Jogja Corruption Watch (JCW)* menuturkan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi yang ditangani Polda maupun Kejati DIY sepanjang tahun 2019 cukup tinggi, nilainya sekitar Rp 23,1 miliar (Kejati DIY). Kasus pertama terungkap pada bulan Juni 2019, adanya dugaan korupsi aset tanah pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) di Kemendikbud. Kedua, pada bulan Juli 2019 terungkap kasus dugaan korupsi di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan pendidikan dan Tenaga kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta. Ketiga, pada pertengahan Juli 2019, Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan Kades Banyurejo sebagai tersangka korupsi dana desa pada tahun 2015-2016. Keempat, bulan Agustus 2019 Tim Satgas KPK melakukan OTT terhadap oknum jaksa dan pengusaha di Solo, Jawa Tengah terkait kasus suap lelang pada proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Soepomo Yogyakarta. Kelima, pada awal Desember 2019, dua pejabat Desa

Banguncipto Sentolo Kulon Progo menyelewengkan dana bantuan dari Pemkab Kulonprogo dalam kurun waktu 2014-2018.

Korupsi merupakan penyebab hambatan pertumbuhan, perkembangan dan kemakmuran rakyat pada berbagai negara (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2017). Nurhadianto dan Khamisah (2019) mengemukakan bahwa :

“Korupsi dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya transparansi dalam hal laporan keuangan di suatu lembaga. Rendahnya transparansi menimbulkan suatu kondisi dimana tindakan korupsi dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, ketika transparansi dapat dilakukan maka masyarakat dapat melihat apa saja yang ada dalam laporan keuangan, sehingga sangat sulit untuk dilakukan manipulasi data”.

Penelitian yang dilakukan oleh Saingura dan Purnomo (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya meningkatkan transparansi dengan menerapkan e-goverment. Langkah ini sebagai upaya mentaati regulasi dari pemerintah pusat untuk memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi kedalam proses tata kelola pemerintah daerahnya serta sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada pemerintahan sehingga meminimalisir terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Harapannya agar masyarakat luas bisa mengakses semua data yang berkaitan dengan pemerintahan secara terbuka. E-goverment yang diterapkan oleh Kabupaten Bantul sudah berjalan cukup memuaskan dengan mencapai nilai yang baik dalam setiap indikator penelitiannya, antara lain indikator efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai upaya transparansi, Kabupaten Bantul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul telah meluncurkan aplikasi Sidat Keuda (Sistem Informasi Data Transaksi Keuangan Daerah) pada Juli 2019. Pada tahun 2019 pula, Kabupaten Bantul menjadi contoh keberhasilan penerapan Transparansi keuangan desa yang dikelola melalui sistem keuangan desa oleh Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. Audit BPK terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Bantul selama tahun 2015-2018 juga menghasilkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dan cukup transparan. Keberhasilan Kabupaten Bantul dalam penerapan transparansi keuangan tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor inilah yang ingin diulas dalam penelitian ini, agar kedepannya bisa dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Studi empiris yang dilakukan oleh Asroel (2016) serta Davici (2018) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah komitmen pimpinan. Menurut Davici (2018), komitmen merupakan penerimaan yang kuat oleh individu terhadap tujuan dan nilai organisasi, hal ini mencakup cara pengembangan tujuan dan mendahulukan misi organisasi daripada pribadi. Semakin tinggi komitmen seseorang maka akan menciptakan loyalitas dalam kinerjanya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepatuhan akan hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen pemimpin (Asroel, 2016). Hasil yang berbeda

diungkapkan oleh Umaroh (2016). Dalam penelitiannya komitmen pimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kambu (2019) serta Pradita, Karina D, dkk (2019) mengungkapkan bahwa faktor ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi ketidakpastian pada lingkungan SKPD, maka organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan dengan keadaan barunya salah satunya dengan meniru konsep penerapan transparansi pelaporan keuangan pada organisasi yang dianggap berhasil. Sehingga transparansi pelaporan keuangan yang telah diterapkan secara meluas akan berakibat pada lingkungan SKPD yang semakin tidak pasti sehingga SKPD tersebut akan berupaya untuk menghadapi dan melakukan berbagai cara agar lingkungan di sekitarnya tetap stabil (Pradita, Karina D, dkk, 2019). Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisriani (2019). Lisriani (2019) menyimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang dianggap berpengaruh adalah pengendalian internal. Noprizal (2017) serta Wintari dan Suardana (2018) mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Semakin tinggi pengendalian internal, maka penerapan transparansi semakin baik. Pengendalian ini berupa sistem untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku sehingga menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan (Wintari dan Suardana, 2018). Sedangkan menurut Wirawan, Reky C dkk (2019), pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi, hal ini dikarenakan dalam penelitiannya penerapan metode penilaian atau pengukuran resiko dan sistem manajemen resiko yang diterapkan masih belum maksimal.

Faktor terakhir yang memengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Kambu (2019) mengemukakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penerapan transparansi. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi SDM, praktik transparansi akan semakin baik. Berbeda dengan Lisriani (2019) dan Wirawan, Reky C, dkk (2019) yang mengungkapkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi. Hasil penelitian Lisriani (2019) mengungkapkan bahwa semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, maka penerapan transparansi semakin rendah. Hal ini memiliki kemungkinan bahwa, Sumber Daya Manusia yang kompeten justru tidak akan menerapkan transparansi pada pelaporan keuangan.

Keberhasilan Kabupaten Bantul dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan dan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Pimpinan, Ketidakpastian Lingkungan, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan**

## **Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Bantul)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas pembahasan dalam penelitian, maka dirumuskan masalah yang akan dikaji dan dibahas sebagai berikut ini :

1. Apakah Komitemen Pimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul?
2. Apakah Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul?
3. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul?

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga lebih terarah, fokus dan tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi tentang transparansi pelaporan keuangan yang terjadi di SKPD Kabupaten Bantul
2. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2020

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh penulis di SKPD Kabupaten Bantul bertujuan untuk :

1. Menguji pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul
2. Menguji pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul
3. Menguji pengaruh Pengendalian Internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul
4. Menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan sebagai langkah perbaikan bagi pemerintahan untuk menerapkan good governance.



## **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang garis besarnya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah yang melandasi pemilihan judul, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisi tentang ringkasan dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis..

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, data dan metode pengumpulan data, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan atas penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian, serta saran dari penulis